

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pasar tradisional memiliki peran penting dalam aktivitas perekonomian yaitu sebagai pusat perekonomian suatu daerah. Pasar tradisional penting dan menyatu dalam kehidupan masyarakat. Masih banyak masyarakat yang masih membutuhkan pasar sebagai kegiatan transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Irman dalam Aris (2015) di Forum Senator untuk Rakyat berpendapat bahwa pondasi dari perekonomian adalah pasar tradisional. Setelah ekonomi kolaps, di beberapa daerah tumbuh kegiatan perekonomian dari rakyat yang berupa pasar tradisional yang memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Sehingga pasar tradisional dapat membantu meningkatkan perekonomian suatu daerah dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

Dalam Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Penataan, Pengelolaan Pasar Dan Retribusi Pasar Daerah, Pertumbuhan ekonomi merupakan ujung tombak perekonomian nasional yang perlu ditingkatkan melalui terbentuknya pasar tradisional yang dapat memenuhi permintaan masyarakat yang usahanya dikelola secara modern. Selain itu, akan menciptakan lapangan kerja luas dan dapat menumbuhkan dunia usaha dan kewiraswastaan baru yang mempunyai keterkaitan luas dengan sektor produksi dan jasa lainnya, sehingga pasar tradisional dapat menumbuhkan tata perdagangan yang lebih mantap, lancar, efisien, efektif dan berkelanjutan.

Ida dasar dari sebuah pasar adalah agar segala proses transaksi, pertukaran barang & jasa berlangsung dengan biaya transaksi yang rendah,

efektif dan adil. Secara sosial dapat melibatkan banyak pelaku yang berkepentingan, secara ekonomi bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan secara finansial menguntungkan bagi semua pelaku didalamnya (penjual, pembeli dan pelaku pendukung) (Devi, 2012). Sejalan dengan ide dasarnya, peran dan fungsi pasar adalah sebagai tempat transaksi untuk mengurangi ketidaksetaraan informasi assimetris (*asymmetric information*), menekan biaya transaksi (*transaction cost*) dan meningkatkan kepercayaan (*trust*) (Leksono, 2009 dalam Devi , 2012)

Pada era otonomi daerah saat ini Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat daerahnya. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang diwujudkan dengan peraturan, pembagian pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Sehingga dalam otonomi daerah diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan daerah sendiri (Toduh, Saerang, & Elim, 2014). Dimana sumber-sumber keuangan daerah salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 1.1Skala Interval Kemampuan Keuangan Daerah

Persentase (%)	Kemampuan Keuangan
00,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01- 20,00	Kurang
20,01-30,00	Cukup
30,01-40,00	Sangat Cukup
40,01-50,00	Baik

Sumber :Tim Fisipol UGM dan Balitbang Depdagri (Oppier, 2013)

Berdasarkan klasifikasi yang ditetapkan Tim Fisipol UGM dan Balitbang Depdagri kemampuan keuangan suatu daerah dikatakan baik jika memiliki nilai derajat desentralisasi sebesar 40,01- 50,00(>40%). Dengan begitu pemerintah daerah mampu meningkatkan kemandirian fiskal di daerah sendiri dan mampu memanfaatkan sumber-sumber pendapatan asli daerahnya secara optimal sehingga ketergantungan fiskal rendah.

Tabel 1.2 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten di Madura Tahun 2011- 2015 (Ribuan Rupiah)

Kabupaten	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Bangkalan	65.039.401	80.253.709	92.722.420	135.785.489	122.079.313
Sampang	46.973.975	61.065.357	66.415.373	123.039.103	121.298.165
Pamekasan	71.054.422	83.373.493	89.463.706	171.518.203	125.125.996
Sumenep	57.944.464	85.871.823	97.052.073	162.371.865	166.654.328

Sumber : Publikasi BPS Kabupaten Bangkalan, 2015

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu daerah yang kemampuan keuangan daerahnya masih rendah dibanding 3 kabupaten di pulau Madura. Berikut adalah Proporsi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah.

Tabel 1.3 Proporsi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun 2011-2015 (Persen)

Kabupaten	Tahun					Rata-rata	Kemampuan keuangan daerah
	2011	2012	2013	2014	2015		
Bangkalan	5,76%	6,82%	6,60%	8,26%	7,56%	7,12%	Sangat kurang
Sampang	5,24%	6,27%	6,02%	9,02%	8,86%	7,34%	Sangat kurang
Pamekasan	7,17%	7,90%	7,33%	11,23%	8,02%	8,51%	Sangat kurang
Sumenep	5,05%	6,41%	6,48%	9,86%	8,99%	7,61%	Sangat kurang

Sumber : Data diolah, 2016

Berdasarkan tabel 1.3 terlihat bahwa derajat desentralisasi fiskal tiap tahunnya Kabupaten Bangkalan mengalami kenaikan. Pada tahun 2011-2014 mengalami kenaikan dari 5,76% menjadi 8,26%. Pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 7,56%. Menurut klasifikasi yang ditetapkan oleh Tim Fisipol UGM dan Balitbang depdagri tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Bangkalan dalam klasifikasi *sangat kurang* dengan rata-rata derajat desentralisasi fiskal kabupaten Bangkalan dalam kurun waktu 2011-2015 sebesar 7,12%. Sehingga ketergantungan fiskal Kabupaten Bangkalan masih tinggi terhadap pemerintah pusat. Maka dari itu pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan perlu menggali lagi sumber-sumber pendapatan asli daerah agar ketergantungan terhadap pemerintah pusat menjadi berkurang salah satunya melalui pengelolaan pasar tradisional.

Berdasarkan data dari kantor pengelolaan pasar Kabupaten Bangkalan memiliki 29 pasar baik pasar kecamatan ataupun pasar desa. Seperti pasar pada umumnya pasar tersebut menjadi tempat pertukaran perekonomian bagi masyarakat Kabupaten Bangkalan. Menurut Ernawati (2016) kondisi pasar tradisional yang buruk seperti tempat yang kumuh, kotor, becek memperburuk citra pasar tradisional di mata pengunjung. Maka dari itu pasar tradisional perlu perhatian dari pemerintah karena semakin banyaknya pasar modern menyebabkan bergesernya peran pasar tradisional sebagai pusat perekonomian khususnya bagi kalangan masyarakat menengah kebawah.

**Tabel 1.4 Fluktuasi Penerimaan Pasar Tradisional Kabupaten Bangkalan
Tahun 2011-2015**

No.	Nama Pasar	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Ki lemah duwur	923.639.000	902.651.000	1.017.577.000	875.109.000	892.776.000
2	Kamal	82.578.500	84.089.000	84.041.000	83.159.500	83.095.500
3	Patemon	62.994.250	66.043.000	72.067.000	68.250.500	69.374.000
4	Bancaran	53.099.500	51.827.000	48.950.000	51.838.000	50.593.000
5	Labang	106.268.700	91.316.850	93.980.200	99.030.080	99.182.620
6	Lomaer	30.291.250	29.289.000	30.948.500	33.719.000	33.013.000
7	Tragah	27.632.590	24.568.560	25.693.310	28.594.835	26.957.210
8	Kwanyar	183.506.600	180.582.300	193.277.600	188.226.000	194.509.600
9	Langkap	127.665.000	140.865.500	137.331.500	135.265.500	135.998.000
10	Campor	32.610.500	33.557.500	34.267.375	36.399.500	35.761.200
11	Kombangan	19.854.500	19.930.750	20.614.000	21.483.250	21.049.250
12	Duwak' buter	56.879.000	56.884.000	57.706.500	62.984.000	59.112.000
13	Galis	78.814.200	76.208.000	78.042.000	79.105.000	81.940.000
14	Klampis	99.905.500	96.459.000	103.079.000	104.720.000	104.421.000
15	Blega	391.460.650	420.315.400	414.203.900	438.638.325	458.441.600
16	Socah	78.116.000	75.449.000	80.420.000	80.408.000	84.511.000
17	Dupok	87.663.700	86.789.200	91.405.000	93.641.680	95.056.000
18	Sukolilo	37.671.000	39.878.000	38.031.000	39.625.776	39.936.904
19	kedungdung	219.818.000	222.095.250	215.621.500	239.811.395	250.003.020
20	Seninan	33.710.500	32.723.000	33.797.000	34.480.500	35.484.500
21	Tanjung bumi	198.847.500	200.136.500	199.848.500	202.597.500	211.990.000

Sumber: Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bangkalan, 2016

Berdasarkan data laporan penerimaan pasar tradisional yang diperoleh dari Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bangkalan. Selama tahun 2011-2015 penerimaan beberapa pasar tradisional di Kabupaten Bangkalan mengalami fluktuasi artinya penerimaan pasar yang di peroleh oleh Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bangkalan setiap tahunnya naik-turun. Namun, penerimaan pasar tradisional tersebut cenderung mengalami peningkatan selama tahun 2011-2015. Sedangkan, selama tahun 2010-2015 hanya ada 8 pasar tradisional di Kabupaten Bangkalan yang setiap tahun penerimaannya mengalami

peningkatan. Berikut adalah data penerimaan pasar tradisional di Kabupaten Bangkalan yang mengalami peningkatan.

Tabel 1.5 Peningkatan Penerimaan Pasar Tradisional Kabupaten Bangkalan Tahun 2010-2015

No.	Nama Pasar	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Sepulu	273.078.000	289.406.000	300.106.000	314.061.090	320.714.500
2	Tanah merah	656.587.500	669.167.800	747.448.500	789.193.000	803.611.200
3	Durjan	160.866.250	161.162.700	174.546.200	186.674.200	190.929.900
4	Modung	50.116.100	54.634.600	57.478.350	58.505.300	60.067.200
5	Arosbaya	214.412.000	216.865.000	221.579.000	222.368.360	226.530.340
6	Tona'an	27.377.000	29.536.000	29.959.000	30.853.500	31.382.460
7	Jaddih	17.154.150	17.663.250	17.726.750	18.204.250	21.049.250
8	Kencur	1.085.000	8.060.000	8.060.000	8.313.000	8.500.000

Sumber: Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bangkalan, 2016

Masyarakat Kabupaten Bangkalan yang mayoritas masyarakatnya merupakan kalangan menengah kebawah, peran pasar tradisional menjadi sangat penting sebagai tempat mereka menjual hasil pertanian, hasil laut dan barang-barang kebutuhan lainnya. Namun saat ini keberadaan pasar tradisional memiliki pesaing karena adanya pembangunan pasar modern seperti alfamart, indomart, swalayan, plaza Bangkalan, dan tom & jerry. Barang yang diperjualbelikan hampir sama dengan di pasar tradisional dan tentunya tempat dan pelayanannya lebih bagus.

Pasar tradisional dapat memberikan kontribusi terhadap daerah melalui penerimaan retribusi pasar. Retribusi pasar merupakan komponen dari retribusi daerah yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kantor pengelolaan pasar sebagai pihak pengelola pasar tradisional dapat meningkatkan penerimaan pasar melalui optimalisasi sumber daya pada pasar tradisional.

Purnamasari (2014), dalam hasil penelitiannya di 9 pasar tradisional di Kota Bekasi menunjukkan bahwa 4 pasar tradisional di Kota Bekasi belum mencapai efisiensi, dimana input dan output yang digunakan dalam penelitian belum digunakan secara optimal, sehingga perlu dilakukan pengembangan dan perbaikan input dan output pada pasar yang belum efisien.

Ernawati (2016), dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional Plaza Bandar Jaya, Lampung Tengah”. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa kebijakan yang diterapkan belum efektif. Kebijakan tersebut juga belum efisien dalam sumber daya manusia, dimana masih kekurangan tenaga kerja untuk mengelola pasar. Namun kebijakan tersebut sudah efisien dalam penggunaan waktu, terlihat dari berbagai permasalahan yang telah ditangani.

Sinaga, Fitri M. (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Eksistensi Pasar Tradisional Menghadapi Pasar Modern Di Kota Surakarta”. Analisis kolerasi pada pasar tradisional dengan pasar modern di kota Surakarta menunjukkan bahwa keberadaan pasar modern mempengaruhi eksistensi pasar tradisional di Kota Surakarta. Walaupun masing-masing pasar memiliki kelebihan dimana segmentasi pasar yang berbeda satu sama lain, namun tetap saja keberadaan pasar modern membuat pasar modern semakin terhimpit. Hal tersebut terjadi dikarenakan keterbatasan modal, rantai distribusi barang yang panjang membuat harga mahal, kondisi fisik dan non fisik yang kurang nyaman, dan kualitas barang yang rendah.

Dalam Analisis Pengembangan Dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah (Studi Evaluasi Kelembagaan Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Bangkalan) yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian Dan Pengabdian

Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Trunojoyo Madura. Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bangkalan menghadapi beberapa permasalahan yaitu: dari sisi kelembagaan, memiliki keterbatasan dalam pengembangan pasar secara progresif; Sisi sumber daya manusia, kompetensi yang dimiliki belum sesuai spesifikasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan pasar; sisi anggaran, alokasi belanja tidak langsung lebih besar dari Biaya Langsung; sisi sarana dan prasarana masih kurang baik dalam hal pemeliharaan; sisi tata kelola, belum optimalnya dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan beberapa pasar belum memiliki *Standar Operational Prosedure* (SOP) yang mengatur pembagian kerja antar divisi; dan minimnya inovasi dalam peningkatan layanan dan peningkatan target pendapatan retribusi.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “EFISIENSI PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL KABUPATEN BANGKALAN ”. Studi terhadap efisiensi pada pasar tradisional dapat mengukur tingkat efisiensi pasar-pasar tradisional yang di observasi. Variabel input dan output yang ditetapkan digunakan untuk menghitung dan mengestimasi nilai efisiensi pasar tradisional sehingga dapat diketahui variabel yang berpengaruh pada efisiensi pasar tradisional di Kabupaten Bangkalan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang diatas maka dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana tingkat efisiensi pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Bangkalan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tingkat efisiensi pasar tradisional di Kabupaten Bangkalan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sebagai salah satu upaya mengkaji ilmu teori ekonomi yang berhubungan dengan pengelolaan pasar tradisional yang telah didapatkan dengan kenyataan di lingkungan masyarakat. Di samping itu, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori guna mengembangkan ilmu teori ekonomi.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Sebagai masukan dalam kebijakan pengelolaan pasar tradisional Kabupaten Bangkalan untuk mengelola pasar tradisional dengan lebih efisien.

2. Bagi Mahasiswa

1. Sebagai bahan informasi bagi pembaca yang ingin mengetahui efisiensi pasar tradisional Kabupaten Bangkalan.
2. Memberikan pengetahuan bagi mahasiswa dan referensi bagi penelitian selanjutnya.
3. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi pada jurusan ekonomi pembangunan.